

TAP 2 Penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di Prov/Kab lokasi SKALA mengacu pada data, khususnya data terkait kebutuhan kelompok rentan, yang valid, termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

Sasaran Fase 1

Sasaran Antara

2.10

Pemerintah pusat menjalankan peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka memastikan Satu Data Daerah berfungsi

2.11

Siklus data daerah di Prov/Kab lokasi SKALA berfungsi didukung dengan sistem perencanaan dan pemutakhiran data yang berjalan secara reguler

2.4

Kelembagaan pengelola siklus data Prov/Kab lokasi SKALA (wali data, pembina data, produsen data, forum satu data) berfungsi

2.8

Pengelola Satu Data Prov/Kab lokasi SKALA (staf yang kompeten) menjalankan peran sesuai fungsi satu data

2.3

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menerbitkan kebijakan atau pedoman tentang forum satu data sesuai Permendagri terbaru dan rencana aksi satu data daerah

2.7

Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki kapasitas terkait pengelolaan siklus satu data dan satu data daerah

2.9

Pemimpin di Prov/Kab lokasi SKALA menunjukkan komitmen dan menjalankan peran koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terkait implementasi Satu Data Daerah

5.1.1.3

Rekomendasi teknis tata kelola pengelolaan SEPAKAT di daerah

MA

5.1.1.1

rancangan ergub Rencana Aksi Satu Data Daerah

5.1.5.1

5.1.1.2

pedoman tata kelola forum satu data daerah

5.1.5.2

5.1.1.4

arsitektur dan peta rencana SPBE

MA

5.1.2.1

ASN Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota pada unit kerja yang relevan terlatih untuk pengelolaan satu data

5.1.5.3

5.4.1.1

Input pengembangan mekanisme dan pedoman pengelolaan pemanfaatan portal satu data termasuk bagi pakai data kebutuhan perencanaan dan penganggaran layanan dasar

6.3.1.1

Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan dari forum satu data daerah kepada pimpinan daerah

PB PA PS GO PD KU

2.1

Pemerintah pusat menerbitkan kerangka kewenangan dan proses bisnis kelembagaan satu data

2.2

Pemerintah pusat menerbitkan kerangka dan SOP pelaksanaan tugas dari pengelola siklus data

2.5

Pemerintah pusat memiliki desain peningkatan kapasitas pengelola satu data daerah

2.6

Pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan kapasitas daerah terkait pengelolaan satu data daerah

2.1.2.3

kebijakan dan panduan implementasi SPBE Pemerintah daerah

2.1.1.2

grand design SDPDN

2.1.1.1

Permendagri SDPDN sesuai kaidah SDI dan SPBE

2.1.1.7

standar data keuangan daerah sesuai prinsip SDI

2.1.1.4

data prioritas lintas komponen dan daerah

2.1.1.6

penyusunan pedoman pemanfaatan regsosok untuk perencanaan daerah

2.1.1.5

penyusunan kebijakan tentang tata kelola, pemanfaatan, dan pemutakhiran Regsosok

2.1.1.8

peta kesiapan Pemprov dalam penerapan Satu Data Daerah

2.1.1.3

penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan forum dan pelaksanaan rencana aksi SDPDN, termasuk petunjuk teknis cakupan data pemerintahan dalam negeri, SOP perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data dalam kerangka SDPDN, petunjuk teknis penyebaran data melalui portal SDPDN, dan tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi SDPDN

2.1.3.1

Input teknis penyusunan desain peningkatan kapasitas pengelola satu data daerah

2.1.1.1

diseminasi kebijakan tentang SDPDN

2.1.1.2

peraturan Menteri tentang SPBE

2.1.2.1

rakor SPBE di Provinsi NTB

2.1.2.6

rancangan arsitektur SPBE nasional yang terkoordinasi dengan daerah

2.1.1.3

proses bisnis penyediaan layanan dasar dalam penerapan SPBE

2.1.2.7

hasil pemetaan data prioritas Kemendagri sesuai rekomendasi K/L

2.1.2.8

hasil pemetaan data lintas komponen dalam Kemendagri

2.1.5.1

kebijakan pengelolaan Regsosok di Pusat dan di Daerah

2.1.5.2

kebijakan pengelolaan SEPAKAT sebagai tools analisis data makro dan mikro

2.1.2.5

Rekomendasi rancangan SOP satu data pemerintahan dalam negeri (PDN)

2.1.2.1

Rekomendasi teknis tentang harmonisasi rancangan Permendagri Standar data pemerintahan dalam negeri

2.1.3.2

Fasilitasi teknis berbagi pembelajaran tentang pelaksanaan satu data daerah

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

2023-2024

2024-2025

2025-2026